

# PENYELAMATAN ARSIP KEMARITIMAN: MENDOKUMENTASIKAN INDONESIA POROS MARITIM DUNIA

*Tujuh tahun silam sudah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kemaritimannya dalam acara Marine Environment Protection Committee (MEPC) di Gedung International Maritime Organization (IMO) London, Inggris (19/4/2016). Kala itu, Presiden Jokowi dengan tegas kembali menyatakan komitmennya bahwa di bawah kepemimpinannya akan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, menggemakan lagi Jalesveva Jayamahe, dan kembali ke jati diri sebagai negara maritim. Berbagai program strategis pun digagas, dirancang dan dijalankan Indonesia untuk mewujudkan tekad menjadi poros maritim dunia. Apalagi Indonesia sudah memiliki bekal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya kelautan yang besar.*

**M**engulas konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, tentu tidak hanya sekadar membahas aspek kelautan. Ada banyak aspek yang turut terlibat dalam pembangunan proses maritim ini, seperti halnya aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Ini tak lain karena membangun negara maritim juga berarti mewujudkan lima pilar pembangunan poros maritim dunia yang mencakup, pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, berkomitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan,

serta pariwisata maritim. Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.

## Kearsipan dan Budaya Maritim

Isu pembangunan kembali budaya maritim terus menguat seiring dengan digagasnya komitmen Presiden Jokowi yang bertekad menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Akan tetapi tidak dipungkiri, meski identitas bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa maritim, seiring berjalannya waktu budaya maritim terdegradasi sejak sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka. Degradasi tersebut di antaranya teridentifikasi adanya perubahan orientasi kultural masyarakat dari laut ke darat yang direpresentasikan oleh berubahnya orientasi perniagaan dari maritim ke darat, sejalan dengan melemahnya kekuatan ekonomi masyarakat lokal

(pada zaman sebelum Indonesia Merdeka) dan sistem pembangunan nasional sampai lokal yang lebih berorientasi pada darat daripada laut (Octavian dan Yulianto, 2014).

Selain itu, keterbatasan budaya maritim, khususnya bagi generasi muda di Indonesia juga disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, M. Firman Hidayat pada saat Rakor Penyelamatan Arsip Kemaritiman di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) (12/06/2023). Menurutnya, generasi muda saat ini masih terbatas mengetahui atau berbicara tentang budaya dan karakter bangsa Bahari. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi alasan pemajuan budaya dan bangsa Bahari menjadi salah satu agenda prioritas dalam Agenda Pembangunan Maritim 2045.

Keseriusan menjalankan agenda prioritas untuk pemajuan budaya dan karakter bangsa Bahari memerlukan strategi untuk penguatan budaya literasi maritim, inovasi dan kreativitas dengan berbagai program pengembangan budaya maritim dan literasi kelautan untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Berbicara budaya maritim dan

karakter bangsa, juga tak lepas dari warisan budaya yang dapat menjadi sumber informasi yang dapat membawa pesan masa lampau. Sumber informasi tersebut menjadi salah satu bahan yang dapat dipelajari dan dimaknai masyarakat, sehingga dapat turut mempengaruhi identitas dan memberi makna kehidupan sehari-hari. Dari berbagai macam sumber informasi, arsip menjadi salah satu sumber informasi sekaligus warisan budaya terdokumentasi yang merekam dan menginformasikan bentuk-bentuk tinggalan budaya maritim. Tetapi pertanyaannya, sudahkah Indonesia memiliki arsip yang mencerminkan budaya maritim yang utuh?

Arsip kemaritiman yang dapat mencerminkan karakter dan jati diri bangsa Indonesia dari masa lampu erat kaitannya dengan pengelolaan arsip statis kemaritiman baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Kepala ANRI, Imam Gunarto pada saat Rakor Penyelamatan Arsip Kemaritiman di ANRI (12/06/2023), harus diakui bahwa kinerja kearsipan tentang kemaritiman masih belum

maksimal untuk bisa membentuk mozaik sejarah Indonesia sebagai negara poros maritim. Arsip yang tersimpan di ANRI sebagian besar arsip tentang sejarah negara daratan. Ini jelas menggambarkan bahwa keberadaan khazanah arsip statis terkait kemaritiman masih minim. Padahal, arsip ini menjadi sumber informasi penting yang mampu menggambarkan budaya maritim Indonesia dari waktu ke waktu.

Oleh karenanya, dalam membangun pemajuan budaya dan bangsa Bahari, sudah selangkahnya juga beriringan dengan melaksanakan penyelamatan dan pelestarian arsip kemaritiman. Seperti halnya yang disampaikan M. Firman Hidayat bahwa kegiatan penyelamatan arsip kemaritiman menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi maritim di masyarakat tetapi tidak hanya literasi. Bahkan nantinya tidak hanya mendorong memelihara budaya maritim, tetapi dapat pula berdampak untuk mendorong perubahan perilaku dan inovasi maritim.

#### **Bukti dan Dokumentasi Poros Maritim Dunia**

Tekad mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia telah diprogramkan dalam 9 (sembilan) Agenda Pembangunan Maritim 2045. Agenda tersebut mencakup Pengembangan Sarana Prasarana Maritim, Peningkatan Konektivitas Maritim, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Perairan, Pembangunan Industri Maritim, Penguatan Pertahanan, Keamanan dan

Keselamatan Maritim, Penguatan Diplomasi Maritim, Penguatan Tata Kelola Maritim, Pemajuan Budaya dan Karakter Bangsa Bahari, serta Pengembangan Iptek dan Sumber Daya Manusia Maritim. Agenda-agenda tersebut tentunya akan melahirkan berbagai program dan kegiatan strategis yang menjadi bagian dari proses upaya Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis tersebut sudah semestinya akan menghasilkan arsip dalam berbagai format yang merekam seluruh peristiwa apa saja yang telah dan akan diupayakan bangsa Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Catatan informasi yang terekam dalam arsip pelaksanaan agenda pembangunan, selanjutnya dapat menjadi bukti dan dokumentasi untuk ingatan atau memori kolektif tentang apa yang telah dialami dan dihadapi suatu bangsa dari masa ke masa.

Urgensi catatan informasi yang terekam dalam arsip pun turut diamini Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana yang turut menyampaikan bahwa dengan pengarsipan juga menjadi salah satu cara untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pengarsipan yang baik akan membantu mempermudah diterimanya Negara Kepulauan oleh masyarakat internasional melalui suatu Perjanjian Internasional. Apalagi Indonesia memiliki kepentingan terkait Negara Kepulauan sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Juanda.

4 (empat) alasan kuat untuk pengarsipan pun ditegaskan Prof.



Hikmahanto, pertama saat The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) diimplementasikan dalam bentuk perundingan dengan negara tetangga pemerintah memiliki berbagai dokumen terkait formulasi pasal. Kedua, arsip dapat digunakan sebagai bukti bila sengketa muncul dan berujung di lembaga peradilan. Ketiga, melalui arsip, para negosiator Indonesia dapat memahami ruh dari formula pasal sehingga mereka tidak terkecoh dengan narasi negosiator negara tetangga. Keempat, melalui arsip lah generasi muda yang tidak turut dalam perundingan memahami secara baik dibuatnya berbagai ketentuan.

Lantas, siapakah yang harus bertanggung jawab saat berbicara bukti dan dokumentasi agenda Pembangunan maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?

### **Kolaborasi**

Merujuk pada regulasi, tepatnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tugas negara di bidang kearsipan diemban oleh ANRI. Namun, kondisi ini tak berarti serta-merta seluruh penyelamatan arsip kemaritiman menjadi sepenuhnya tanggung jawab ANRI. Pada regulasi yang sama, setiap pencipta arsip memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan kearsipan, mulai arsip tersebut diciptakan sampai dengan disusutkan. Ini artinya, pencipta arsip yang dapat terdiri dari lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan juga turut



Pelabuhan pasar ikan di Teluk Betung  
Sumber : ANRI, Kempen Sumsel 520623 DD 13

andil untuk menyelamatkan arsip kemaritiman.

Pesan kolaborasi untuk menambah khazanah arsip kemaritiman di ANRI dan Lembaga Kearsipan juga diamanatkan secara terang-terangan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat Rakor Penyelamatan Arsip Maritim (12/06/2023). Seluruh instansi pusat dan daerah dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri untuk mengumpulkan dan menyelamatkan arsip kemaritiman ke ANRI dan lembaga kearsipan daerah.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dukungan dan partisipasi aktif berbagai tingkatan jelas dibutuhkan untuk mendukung ANRI dan lembaga kearsipan di daerah dapat memberikan bahan informasi kearsipan sejarah

kemaritiman bangsa Indonesia. Ini artinya, kolaborasi dengan berbagai pihak turut menjadi kunci untuk menyelamatkan arsip kemaritiman sebagai bukti dan dokumentasi perjuangan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Tak hanya itu, komitmen dan integritas pun dibutuhkan agar para penyelenggara negara yang memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan maritim juga turut menyadari dan bertanggung jawab, bahwa segala bukti dan dokumentasi yang tercipta memiliki kontribusi besar dalam hal mewariskan informasi untuk pemajuan budaya dan karakter bangsa Bahari. (TK)